

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Gambaran tentang Kompetensi SDM, Teknologi informasi, implementasi kebijakan dan pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang adalah Baik. Dari hasil ini, maka hipotesis pertama diterima.
- 2) Variabel Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dari hasil ini, maka hipotesis kedua diterima.
- 3) Variabel Teknologi informasi signifikan terhadap pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dari hasil ini, maka hipotesis ketiga diterima.
- 4) Variabel Implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dari hasil ini, maka hipotesis keempat diterima.
- 5) Variabel Kompetensi SDM, Teknologi informasi, implementasi kebijakan dan pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Kupang. Dari hasil ini, maka hipotesis kelima diterima.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan kepada manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi SDM bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: menyelenggarakan pelatihan dan bimtek secara khusus pada bendahara aset di sekolah-sekolah negeri.
2. Meningkatkan Teknologi informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, terutama pada pembuatan aplikasi dan pelatihan terhadap aplikasi yang ada.
3. Meningkatkan Implementasi kebijakan kerja pada bendahara aset. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan yang lebih terkoordinir dalam pelaporan aset sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.
4. Meningkatkan asas transparansi, efisiensi dan kepastian nilai dalam penyelenggaraan pengelolaan barang daerah sehingga masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, agar barang daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan agar nilai barang dapat diketahui secara pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bromley, Daniel W. 2004. *Economic Interest and Institution*. New York. Basil Blackwell Ltd.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif. Rangkuman 7 Undang-undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri*. Jakarta. Indeks.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Ghozali, Imam. 2008. *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Semarang. Badan Penelitian Universitas Diponegoro.
- Hamalik, Oemar. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Manajemen Pelatihan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ivancevich, Jhon M. 2001. *Human Resource Management, 8<sup>th</sup> Edition*. Boston. McGraw-Hill.
- Jogiyanto. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Jogiyanto, Hartono. 2005. *Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta. Andi.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2001. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Levis, Rafael. 2013. *Metode Penelitian Perilaku Petani*. Maumere. Penerbit Ledalero.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung. PT. Remaja Rosda.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2002. *Perencanaan & Pembangunan Sistem. Informasi*. Yogyakarta. Andi.
- Siregar, Doli. 2004. *Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sugiyanto. 2001. *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung. Penerbit CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Supriyanto, Aji. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi, Edisi Pertama*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Wahab, A. Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wardiana, Wawan. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia.
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, M. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta. Salemba Empat.

### **Jurnal dan Tesis**

- Agung, Tut Madiguna. 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem (E-Jurnal)*. Akuntansi Universitas Udayana Vol. 23 No.2.
- Andrews & Higson. 2007. *Role of undergraduate Work Placement in Developing Employment Competences: Result From a 5 year Study of Employers* (Jurnal). Journal of Property Investment & Finance Vol. 24 No.3.
- Dewi, Hilda Gustrina. 2012. *Analisis hasil Audit BPK-RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga (Tesis)*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Dewi, Retno Daru. 2008 *Analisis Kinerja Pengelolaan Aset dengan Pendekatan Balance Scorecard (Tesis)*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Handayani, Lilik Yuli. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat*

(Tesis). Jakarta. Universitas Indonesia.

Inayah. 2010. *Studi Persepsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Kota Tangerang (Tesis)*. Jakarta. Universitas Indonesia.

Putra, Ervin Dwi. 2009. *Apa dan Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemeriksa. Majalah Dwiwulanan BPK RI*. No. 118/Edisi AgustusSeptember 2009/Tahun XXVII.

Rizna Citra Pertiwi. 2015. *Analisis hubungan Struktur Board of Director dan Board of Commissioner terhadap Kinerja dari Perusahaan Non Financial yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013, Tesis*. Universitas Indonesia.

Setiawati, Eka. 2008. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pusat Perbukuan pada Barang Milik Negara (Tesis)*. Jakarta. Universitas Indonesia.

Setyowati, Lilis. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Jurnal)*. Jurnal Kinerja Vol. 20 No. 2.

Vathanopas dan Thai-ngam. 2007. *Competency Requirements for Effective Job Performance (Journal)*. Journal of Asian Business Strategy, Vol 3.No.1, March.

Yusuf, M. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta. Salemba Empat.

### **Peraturan-Peraturan**

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraph 65 (a) tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Peraturan Walikota Kupang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang

Peraturan Walikota Kupang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Kupang

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 283 tentang Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang Undang RI Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah